

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN BAHASA INDONESIA (DITINJAU DARI PERSPEKTIF SEJARAH BAHASA INDONESIA)

Elfiza Fadhelin¹, Eli Yulyansari², Indi Olivia³, Nesy Yopitasari⁴,
Riska Aulia Safitri⁵, Ira Yuniati⁶, Ade Tiara Yulinda⁷

¹⁻⁷ Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Jl. Bali, Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Email: elfizafadhelin@gmail.com

Article History

Received: 16-07-2026

Revision: 19-08-2026

Accepted: 26-08-2026

Published: 31-08-2026

Abstract. The current of globalization and the development of information technology have increased the use of foreign languages in various fields of life, thus creating challenges to maintaining the existence of Indonesian as a national language and state language. This condition encourages the importance of studying the efforts that have been made to maintain the function, status, and development of Indonesian. This study aims to analyze the role of the Indonesian Language Congress in maintaining the existence of Indonesian amidst the development of globalization and modernization. The study uses a library research method by reviewing various scientific sources, official documents, laws and regulations, and publications regarding the implementation of the Indonesian Language Congress. Data are analyzed descriptively through the process of reduction, grouping, interpretation, and drawing conclusions from information obtained from various sources. The results of the study indicate that the Indonesian Language Congress plays a strategic role in formulating language policies, developing vocabulary, fostering and protecting Indonesian, and strengthening the function of Indonesian as a language of science, education, and national communication. Thus, the Indonesian Language Congress is an important instrument in supporting the continued existence of Indonesian so that it remains adaptive to developments in science, technology, and global dynamics.

Keywords: History, Development, Indonesian.

Abstrak. Arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan penggunaan bahasa asing dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga memunculkan tantangan terhadap pemertahanan eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kondisi tersebut mendorong pentingnya kajian mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menjaga fungsi, kedudukan, dan perkembangan bahasa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kongres Bahasa Indonesia dalam menjaga eksistensi bahasa Indonesia di tengah perkembangan globalisasi dan modernisasi. Penelitian menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta publikasi mengenai penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia. Data dianalisis secara deskriptif melalui proses reduksi, pengelompokan, interpretasi, dan penarikan kesimpulan terhadap informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kongres Bahasa Indonesia berperan sebagai forum strategis dalam perumusan kebijakan kebahasaan, pengembangan kosakata, pembinaan dan perlindungan bahasa Indonesia, serta penguatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, pendidikan, dan komunikasi nasional. Dengan demikian, Kongres Bahasa Indonesia menjadi instrumen penting dalam mendukung keberlanjutan eksistensi bahasa Indonesia agar tetap adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika global.

Kata Kunci: Sejarah, Perkembangan, Bahasa Indonesia.

How to Cite: Fadhelin, E., Yulyansari, E., Olivia, I., Yopitasari, N., Safitri, R. A., Yuniati, I., & Yulinda, A. T. (2026). Sejarah dan Perkembangan Bahasa Indonesia (Ditinjau dari Perspektif Sejarah Bahasa Indonesia). *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 7 (4), 5281-5292. <http://doi.org/10.54373/imeij.v7i4.7120>

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap penggunaan bahasa dalam kehidupan masyarakat. Meningkatnya interaksi lintas negara mendorong penggunaan bahasa asing, khususnya dalam bidang pendidikan, bisnis, ilmu pengetahuan, dan komunikasi digital. Di sisi lain, fenomena tersebut juga diikuti dengan semakin luasnya penggunaan bahasa gaul dan campur kode dalam komunikasi sehari-hari, terutama di kalangan generasi muda. Kondisi ini berpotensi mengurangi penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah serta melemahkan fungsinya sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa (Paauw, 2019; Okarisma et al., 2022).

Tantangan tersebut menjadi semakin penting mengingat Indonesia merupakan negara multibahasa yang memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Keberagaman bahasa tersebut memperlihatkan kekayaan budaya bangsa, tetapi sekaligus menempatkan bahasa Indonesia pada posisi strategis sebagai bahasa pemersatu antarsuku, antarbudaya, dan antarwilayah (Samuel, 2018). Oleh karena itu, keberlangsungan bahasa Indonesia tidak hanya bergantung pada penggunaannya sebagai alat komunikasi, tetapi juga pada berbagai kebijakan yang mendukung pembinaan, pengembangan, dan pelindungannya agar tetap mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika masyarakat global.

Salah satu upaya yang secara konsisten dilakukan pemerintah untuk memperkuat kedudukan bahasa Indonesia adalah penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia. Kongres ini menjadi forum nasional yang mempertemukan akademisi, praktisi, pemerintah, dan pemerhati bahasa untuk merumuskan arah kebijakan kebahasaan, mengevaluasi perkembangan bahasa Indonesia, serta menghasilkan rekomendasi strategis bagi pembinaan dan pengembangannya. Berbagai keputusan yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kongres telah memberikan kontribusi terhadap pembaruan ejaan, pengembangan kosakata, penyusunan kebijakan bahasa, serta penguatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, pendidikan, dan administrasi negara.

Berbagai penelitian sebelumnya umumnya membahas sejarah perkembangan bahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, atau pengaruh globalisasi terhadap penggunaan bahasa Indonesia (Paauw, 2019; Repelita, 2018; Samuel, 2018). Namun, kajian yang secara khusus menganalisis kontribusi penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia sebagai instrumen kebijakan dalam menjaga eksistensi bahasa Indonesia di era globalisasi masih relatif terbatas. Padahal, kongres tersebut memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia agar tetap relevan terhadap perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian

mengenai bagaimana hasil-hasil Kongres Bahasa Indonesia berkontribusi terhadap penguatan eksistensi bahasa Indonesia dalam konteks kebahasaan kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kongres Bahasa Indonesia dalam menjaga dan memperkuat eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional di tengah tantangan globalisasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kontribusi Kongres Bahasa Indonesia terhadap pembinaan, pengembangan, dan perlindungan bahasa Indonesia, sekaligus menjadi referensi bagi penguatan kebijakan kebahasaan di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji peran Kongres Bahasa Indonesia dalam menjaga eksistensi bahasa Indonesia berdasarkan berbagai sumber tertulis, sehingga data yang diperlukan diperoleh melalui dokumen dan literatur yang relevan tanpa melakukan penelitian lapangan. Menurut Zed (2018), studi pustaka merupakan metode penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber kepustakaan sebagai data utama untuk menjawab permasalahan penelitian.

Prosedur penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi masalah dan penetapan fokus penelitian, yaitu mengkaji eksistensi bahasa Indonesia di era globalisasi serta peran Kongres Bahasa Indonesia dalam pembinaan dan pengembangannya. Tahap kedua adalah pengumpulan data, yang dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber, meliputi buku, artikel ilmiah, prosiding, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, serta laporan penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia. Sumber pustaka dipilih berdasarkan kriteria relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas penerbit, dan keterbaruan publikasi.

Tahap ketiga adalah seleksi dan klasifikasi data, yaitu menyeleksi literatur yang sesuai dengan fokus penelitian, kemudian mengelompokkan informasi berdasarkan tema, seperti perkembangan bahasa Indonesia, kebijakan kebahasaan, penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia, serta hasil-hasil yang dihasilkan dari setiap kongres. Tahap selanjutnya adalah analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu melalui proses reduksi data, pengorganisasian informasi, interpretasi terhadap isi dokumen, serta penarikan kesimpulan secara deskriptif. Analisis dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi Kongres Bahasa Indonesia terhadap pemeliharaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Untuk meningkatkan keabsahan hasil penelitian, peneliti menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan

informasi yang diperoleh dari berbagai referensi, baik buku, artikel ilmiah, dokumen pemerintah, maupun publikasi resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Melalui prosedur tersebut, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi serta mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran Kongres Bahasa Indonesia dalam menjaga eksistensi bahasa Indonesia di era globalisasi.

HASIL DAN DISKUSI

Perkembangan bahasa Indonesia tidak berlangsung secara tiba-tiba, melainkan melalui proses historis yang panjang yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Bahasa Indonesia berakar pada bahasa Melayu Riau yang sejak masa Kerajaan Sriwijaya telah berfungsi sebagai *lingua franca* di Nusantara. Keberadaan prasasti-prasasti berbahasa Melayu Kuno, seperti Prasasti Kedukan Bukit (682 M), menunjukkan bahwa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa administrasi, perdagangan, dan komunikasi antardaerah. Fungsi tersebut menjadi modal utama yang menjadikan bahasa Melayu lebih mudah diterima oleh masyarakat yang memiliki latar belakang etnis dan bahasa yang beragam dibandingkan bahasa daerah lainnya (Utami, 2017).

Perkembangan berikutnya terjadi pada masa Kesultanan Riau-Lingga ketika bahasa Melayu tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga berkembang sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan sastra. Kehadiran tokoh seperti Raja Ali Haji memberikan kontribusi besar melalui penyusunan karya-karya kebahasaan, seperti *Bustan al-Katibin* dan *Kitab Pengetahuan Bahasa*, yang menjadi dasar pembakuan tata bahasa dan ejaan Melayu. Bersamaan dengan itu, organisasi Rusydiah Klab berperan sebagai komunitas intelektual yang mendorong perkembangan tradisi menulis dan penerbitan karya sastra Melayu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan bahasa pada periode ini tidak hanya dipengaruhi oleh penggunaan sehari-hari, tetapi juga oleh aktivitas intelektual yang memperkuat fungsi bahasa sebagai media pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan (Mulyati, 2015; Utami, 2017).

Pada masa kolonial Belanda, perkembangan bahasa Melayu semakin dipercepat melalui kebijakan pendidikan. Penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah bumiputra pada tahun 1865 bukan semata-mata bertujuan mengembangkan bahasa lokal, melainkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan kolonial. Namun demikian, kebijakan tersebut secara tidak langsung memperluas penggunaan bahasa Melayu dalam dunia pendidikan dan meningkatkan standarisasi bahasa melalui penerbitan buku-buku pelajaran. Dengan demikian, kebijakan kolonial justru menjadi salah satu faktor yang mempercepat

penyebaran bahasa Melayu ke berbagai wilayah di Indonesia. Transformasi paling penting terjadi pada awal abad ke-20 ketika bahasa Melayu berubah fungsi dari bahasa komunikasi menjadi simbol identitas nasional. Penggunaan bahasa Melayu dalam berbagai organisasi pergerakan, seperti Budi Utomo dan Kongres Pemuda, memperlihatkan bahwa bahasa memiliki peran strategis dalam membangun solidaritas antarsuku. Puncak perubahan tersebut terjadi melalui Sumpah Pemuda tahun 1928, ketika bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pemilihan bahasa Indonesia didasarkan bukan hanya pada pertimbangan linguistik, tetapi juga pada kebutuhan politik untuk membangun identitas nasional yang mampu menyatukan masyarakat Indonesia yang majemuk (Achadiati Ikram, 2009).

Setelah Indonesia merdeka, perkembangan bahasa Indonesia semakin terarah melalui berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyempurnaan ejaan, penyusunan istilah ilmiah, pengembangan kamus, serta pembentukan lembaga kebahasaan. Pada era globalisasi, tantangan yang dihadapi tidak lagi berkaitan dengan penerimaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, tetapi pada kemampuannya beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi digital. Meningkatnya penggunaan bahasa asing dan fenomena campur kode menunjukkan bahwa bahasa Indonesia harus terus dikembangkan agar tetap relevan tanpa kehilangan identitasnya. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan bahasa melalui kebijakan pemerintah, termasuk penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia, menjadi strategi penting untuk menjaga daya saing bahasa Indonesia di tingkat nasional maupun internasional.

Secara keseluruhan, perkembangan bahasa Indonesia menunjukkan bahwa eksistensinya dibentuk oleh interaksi antara faktor sejarah, kebijakan pendidikan, gerakan nasionalisme, dan kebijakan kebahasaan. Bahasa Indonesia tidak hanya berkembang sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol identitas nasional yang terus beradaptasi dengan dinamika masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberlanjutan eksistensi bahasa Indonesia sangat bergantung pada upaya pembinaan dan pengembangannya secara sistematis agar mampu menjawab tantangan global tanpa mengurangi fungsi utamanya sebagai bahasa persatuan bangsa.

Perkembangan bahasa Indonesia

Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 merupakan titik balik dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sebelum peristiwa tersebut, bahasa Melayu telah digunakan secara luas sebagai *lingua franca* di

berbagai wilayah Nusantara. Namun, melalui Sumpah Pemuda, bahasa Melayu memperoleh identitas baru sebagai bahasa Indonesia, sehingga fungsinya berubah dari sekadar alat komunikasi antarsuku menjadi simbol persatuan dan identitas nasional. Perubahan ini menunjukkan bahwa perkembangan bahasa Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh aspek linguistik, tetapi juga oleh kebutuhan politik dan sosial dalam membangun nasionalisme di tengah keberagaman suku, budaya, dan bahasa daerah.

Butir ketiga Sumpah Pemuda, yaitu "*Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia,*" menjadi dasar legitimasi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Penggunaan istilah *bahasa Indonesia* menggantikan *bahasa Melayu* merupakan keputusan strategis yang bertujuan membangun identitas kebangsaan yang lebih inklusif sehingga dapat diterima oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa dikaitkan dengan etnis tertentu (Sudaryanto, 2018). Dengan demikian, bahasa Indonesia menjadi instrumen pemersatu bangsa sekaligus sarana untuk memperkuat kesadaran nasional menjelang kemerdekaan.

Pengakuan tersebut tidak berhenti pada tataran simbolik, tetapi diikuti oleh berbagai upaya pembinaan bahasa secara sistematis. Salah satunya melalui penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia (KBI) I di Solo pada tahun 1938. Kongres ini menjadi forum pertama yang secara khusus membahas arah pengembangan bahasa Indonesia, mulai dari pembaruan ejaan, penyusunan tata bahasa, pengembangan kosakata, hingga penggunaan bahasa Indonesia dalam pers, pendidikan, dan administrasi pemerintahan (Sudaryanto, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa setelah memperoleh legitimasi sebagai bahasa persatuan, perhatian mulai bergeser pada upaya meningkatkan kualitas bahasa Indonesia agar mampu menjalankan fungsi yang lebih luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menariknya, penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia pertama diprakarsai oleh wartawan, penulis, dan pemerhati bahasa, bukan oleh ahli bahasa profesional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan bahasa Indonesia pada masa awal merupakan gerakan sosial yang lahir dari kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bahasa sebagai identitas bangsa. Hasil kongres kemudian memberikan dampak nyata, salah satunya penggunaan bahasa Indonesia dalam sidang *Volksraad* oleh Fraksi Nasional yang dipimpin M. H. Thamrin. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa bahasa Indonesia mulai memperoleh legitimasi dalam ruang politik dan pemerintahan, meskipun masih menghadapi penolakan dari pemerintah kolonial Belanda.

Apabila dianalisis lebih lanjut, topik-topik yang dibahas dalam Kongres Bahasa Indonesia I, seperti pembakuan ejaan, pengembangan istilah, penyusunan tata bahasa, dan penggunaan bahasa dalam media massa, merupakan isu yang tetap relevan hingga saat ini. Perbedaannya

terletak pada konteks tantangan yang dihadapi. Jika pada masa awal fokus utama adalah membangun identitas nasional dan standardisasi bahasa, maka pada era globalisasi tantangannya bergeser pada penguatan daya saing bahasa Indonesia di tengah dominasi bahasa asing dan perkembangan teknologi digital. Dengan demikian, penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga menunjukkan adanya kesinambungan kebijakan dalam menjaga eksistensi bahasa Indonesia agar tetap adaptif terhadap perkembangan zaman.

Secara keseluruhan, perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan menunjukkan bahwa keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh keputusan politik melalui Sumpah Pemuda, tetapi juga oleh proses pembinaan yang berkelanjutan melalui Kongres Bahasa Indonesia. Temuan ini mengindikasikan bahwa eksistensi bahasa Indonesia dibangun melalui sinergi antara semangat nasionalisme, kebijakan kebahasaan, dan partisipasi masyarakat, sehingga mampu mempertahankan fungsinya sebagai bahasa persatuan sekaligus terus berkembang sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan komunikasi nasional.

Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Resmi Negara

Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara melalui Pasal 36 UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 menandai perubahan fungsi bahasa Indonesia dari simbol persatuan menjadi instrumen resmi penyelenggaraan negara. Jika pada masa pergerakan nasional bahasa Indonesia berperan membangun identitas kolektif bangsa, maka setelah kemerdekaan bahasa Indonesia dituntut mampu menjalankan fungsi yang lebih kompleks sebagai bahasa pemerintahan, pendidikan, hukum, administrasi, dan ilmu pengetahuan. Perubahan fungsi tersebut menunjukkan bahwa penguatan eksistensi bahasa Indonesia tidak hanya bergantung pada penerimaan masyarakat, tetapi juga pada dukungan kebijakan negara yang menjamin penggunaannya dalam berbagai sektor kehidupan.

Konsekuensi dari perluasan fungsi tersebut adalah perlunya standardisasi bahasa agar penggunaannya seragam di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah ialah menetapkan Ejaan Republik atau Ejaan Soewandi pada tahun 1947 sebagai penyempurnaan Ejaan van Ophuijsen. Penyederhanaan penulisan, seperti perubahan *oe* menjadi *u*, bukan sekadar perubahan teknis, melainkan mencerminkan upaya melepaskan bahasa Indonesia dari pengaruh kolonial Belanda sekaligus membangun identitas kebahasaan bangsa yang merdeka (Sudaryanto, 2017). Dengan demikian, reformasi ejaan memiliki dimensi politik dan kultural karena menjadi simbol kedaulatan bangsa dalam menentukan standar bahasanya sendiri.

Upaya standardisasi tersebut berlanjut melalui Kongres Bahasa Indonesia II pada tahun 1954 yang diselenggarakan pemerintah. Berbeda dengan Kongres Bahasa Indonesia I yang lebih didorong oleh inisiatif masyarakat, kongres kedua menunjukkan meningkatnya peran negara dalam pembinaan bahasa. Salah satu hasil penting kongres ini adalah pembentukan Panitia Pembaharuan Ejaan yang kemudian menjadi dasar lahirnya Ejaan yang Disempurnakan (EYD) pada tahun 1972 (Sudaryanto, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa kongres bahasa tidak hanya berfungsi sebagai forum diskusi, tetapi juga menghasilkan kebijakan yang memiliki dampak nyata terhadap perkembangan bahasa Indonesia.

Pemberlakuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) pada tahun 1972 menjadi tonggak penting dalam proses modernisasi bahasa Indonesia. Perubahan penulisan, seperti *tj* menjadi *c*, *dj* menjadi *j*, *nj* menjadi *ny*, dan *sj* menjadi *sy*, bertujuan meningkatkan konsistensi dan kemudahan penggunaan bahasa dalam pendidikan, administrasi, dan penerbitan ilmiah. Standardisasi tersebut juga memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan karena menghasilkan sistem penulisan yang lebih sederhana, mudah dipelajari, dan selaras dengan perkembangan komunikasi modern. Dengan demikian, perubahan ejaan tidak hanya meningkatkan efisiensi berbahasa, tetapi juga memperluas fungsi bahasa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan.

Perkembangan berikutnya ditandai dengan lahirnya rumusan Politik Bahasa Nasional melalui Praseminar Politik Bahasa Nasional (1974), Seminar Politik Bahasa Nasional (1975), dan penyempurnaannya pada Seminar Politik Bahasa tahun 1999. Berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang berfokus pada pembakuan bentuk bahasa, politik bahasa nasional memberikan arah yang lebih komprehensif terhadap pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah tidak hanya mengatur penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, tetapi juga merancang strategi pengembangan kosakata, pembinaan penggunaan bahasa di masyarakat, serta pelestarian bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional (Kridalaksana, 2011).

Analisis terhadap perkembangan pada fase ini menunjukkan bahwa penguatan eksistensi bahasa Indonesia berlangsung melalui dua strategi yang saling melengkapi, yaitu standardisasi bahasa dan institusionalisasi kebijakan kebahasaan. Standardisasi diwujudkan melalui pembaruan ejaan dan penyusunan kaidah bahasa, sedangkan institusionalisasi dilakukan melalui pembentukan lembaga kebahasaan dan perumusan politik bahasa nasional. Sinergi kedua strategi tersebut menjadikan bahasa Indonesia tidak hanya kokoh sebagai bahasa resmi negara, tetapi juga semakin siap menjalankan fungsi sebagai bahasa pendidikan, ilmu pengetahuan, pemerintahan, dan komunikasi nasional. Temuan ini menunjukkan bahwa

keberhasilan bahasa Indonesia mempertahankan eksistensinya tidak terjadi secara alami, melainkan merupakan hasil dari kebijakan pembinaan dan pengembangan bahasa yang dilakukan secara berkelanjutan oleh negara dan didukung oleh masyarakat.

Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Internasional

Perkembangan bahasa Indonesia pada era global ditandai oleh perubahan orientasi kebijakan dari pembinaan penggunaan bahasa di dalam negeri menuju peningkatan peran bahasa Indonesia di tingkat internasional. Momentum penting terjadi pada Kongres Bahasa Indonesia IX tahun 2008 yang mengangkat tema "*Bahasa Indonesia Membentuk Insan Indonesia Cerdas Kompetitif di Atas Pondasi Peradaban Bangsa.*" Berbeda dengan kongres-kongres sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada pembakuan bahasa, kongres ini mulai mengarahkan pengembangan bahasa Indonesia sebagai instrumen diplomasi budaya, pendidikan, dan kerja sama internasional. Pergeseran orientasi tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan (Sudaryanto, 2015).

Perubahan orientasi tersebut menunjukkan bahwa internasionalisasi bahasa Indonesia bukan sekadar memperluas jumlah penuturnya, tetapi juga meningkatkan fungsi strategis bahasa Indonesia dalam pendidikan, ilmu pengetahuan, diplomasi, dan komunikasi global. Oleh karena itu, pemerintah mengembangkan berbagai program, seperti Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), penyusunan bahan ajar yang terstandar, serta pengiriman pengajar bahasa Indonesia ke berbagai negara. Strategi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan bahasa Indonesia dilakukan melalui pendekatan diplomasi kebahasaan yang berkelanjutan.

Untuk memahami arah perkembangan tersebut, evolusi kebijakan bahasa Indonesia melalui Kongres Bahasa Indonesia dapat disintesis sebagai berikut.

Tabel 1. Sintesis Perkembangan Kongres Bahasa Indonesia dan Kontribusinya terhadap Eksistensi Bahasa Indonesia

Periode Kongres	Fokus Pengembangan	Kontribusi terhadap Bahasa Indonesia
KBI I-II (1938-1954)	Pembinaan bahasa dan pembaruan ejaan	Memperkuat kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional serta menjadi dasar lahirnya pembaruan ejaan.
KBI III-VII (1978-1998)	Standardisasi dan pengembangan kebahasaan	Menghasilkan penyempurnaan tata bahasa, penyusunan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembentukan lembaga kebahasaan, dan penguatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.
KBI VIII-X (2003-2013)	Internasionalisasi dan diplomasi kebahasaan	Mendorong pengembangan BIPA, diplomasi bahasa, serta penguatan kebijakan internasionalisasi bahasa Indonesia melalui UU No. 24 Tahun 2009.

Tabel 1 menunjukkan bahwa fokus Kongres Bahasa Indonesia mengalami perubahan yang mengikuti kebutuhan bangsa pada setiap periode. Kongres-kongres awal lebih diarahkan pada pembentukan identitas nasional dan pembakuan bahasa, sedangkan kongres periode berikutnya menitikberatkan pada penyempurnaan sistem kebahasaan melalui pembakuan ejaan, tata bahasa, dan kosakata. Memasuki abad ke-21, orientasi kebijakan bergeser ke arah internasionalisasi bahasa Indonesia sebagai bagian dari diplomasi budaya dan penguatan posisi Indonesia dalam pergaulan global. Perubahan fokus tersebut menunjukkan bahwa perkembangan bahasa Indonesia berlangsung secara adaptif sesuai dengan dinamika sosial, politik, dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Implementasi kebijakan internasionalisasi tersebut mulai terlihat melalui semakin luasnya penyelenggaraan program BIPA di berbagai negara serta meningkatnya kerja sama pemerintah Indonesia dengan perguruan tinggi internasional dalam pengajaran bahasa Indonesia. Kondisi ini mengindikasikan bahwa bahasa Indonesia tidak lagi berfungsi semata sebagai bahasa nasional, tetapi mulai berkembang sebagai media komunikasi akademik dan pertukaran budaya. Namun demikian, upaya tersebut masih menghadapi tantangan berupa dominasi bahasa Inggris dalam komunikasi global, sehingga peningkatan kualitas pembelajaran BIPA, pengembangan istilah ilmiah, digitalisasi sumber belajar, dan diplomasi kebahasaan perlu terus diperkuat agar daya saing bahasa Indonesia semakin meningkat.

Berdasarkan sintesis perkembangan tersebut, dapat dipahami bahwa eksistensi bahasa Indonesia dibangun melalui proses yang berkelanjutan. Tahap awal difokuskan pada pembentukan identitas nasional, kemudian berkembang menuju standarisasi sistem kebahasaan, hingga akhirnya diarahkan pada internasionalisasi bahasa melalui kebijakan negara dan diplomasi pendidikan. Dengan demikian, perkembangan bahasa Indonesia tidak hanya menunjukkan keberhasilan mempertahankan fungsinya sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara, tetapi juga mencerminkan kemampuan bahasa Indonesia untuk beradaptasi dengan tuntutan globalisasi tanpa kehilangan identitas nasionalnya. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan internasionalisasi bahasa Indonesia sangat ditentukan oleh kesinambungan antara kebijakan pemerintah, pengembangan ilmu kebahasaan, dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan bahasa Indonesia di berbagai ranah internasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka, perkembangan bahasa Indonesia menunjukkan bahwa eksistensinya tidak terbentuk secara alami, tetapi merupakan hasil proses historis, kebijakan negara, dan pembinaan kebahasaan yang berlangsung secara berkelanjutan. Bahasa Indonesia

yang berakar dari bahasa Melayu berkembang melalui tiga fase utama, yaitu sebagai bahasa persatuan, bahasa resmi negara, dan bahasa internasional. Setiap fase memperlihatkan perubahan fungsi bahasa yang menyesuaikan kebutuhan bangsa, mulai dari membangun identitas nasional, mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pendidikan, hingga menjadi instrumen diplomasi budaya dan komunikasi global.

Hasil sintesis juga menunjukkan bahwa Kongres Bahasa Indonesia berperan sebagai mekanisme evaluasi dan perumusan kebijakan kebahasaan yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Fokus kongres mengalami pergeseran dari pembentukan identitas nasional dan standarisasi bahasa menuju pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan bahasa internasional. Hal ini mengindikasikan bahwa keberlanjutan eksistensi bahasa Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kebijakan kebahasaan untuk merespons perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, serta tantangan globalisasi. Dengan demikian, penguatan bahasa Indonesia pada masa mendatang tidak cukup dilakukan melalui pembakuan kaidah bahasa, tetapi perlu diiringi dengan peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan kosakata ilmiah, pemanfaatan teknologi digital, serta perluasan program internasionalisasi, seperti Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). Upaya tersebut menjadi strategi penting agar bahasa Indonesia tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai identitas nasional sekaligus meningkatkan daya saingnya dalam komunikasi akademik dan internasional.

REFERENSI

- Amanan, & Sabrina. (2023). Menilik asal-usul bahasa Indonesia. *Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia*, 5(3), Edisi 1.
- Barnes, C., & Mercer, G. (2016). *Disability, work, and welfare: Challenging the social exclusion of disabled people*. *Peace Research Abstracts Journal*, 43(1).
- Kridalaksana, H. (2011). *Kamus linguistik* (4th ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- Maftuhin, A. (2017). Mendefinisikan kota inklusif: Asal usul, teori, dan indikator. *TATALOKA*, 19(2).
- Mulyati. (2015). *Terampil berbahasa Indonesia untuk perguruan tinggi*. Prenadamedia Group.
- Mailani, O., Nuraeni, I., Syakila, S. A., & Lazuar, J. (2022). Bahasa sebagai alat komunikasi dalam kehidupan manusia. *KAMPRET Journal*, 1(2).
- Paauw, S. (2019). One land, one nation, one language: An analysis of Indonesia's national language policy. In H. Lehnert-LeHouillier & A. B. Fine (Eds.), *University of Rochester Working Papers in the Language Sciences*, 5(1), 2–16.
- Repelita, T. (2018). Sejarah perkembangan bahasa Indonesia (Ditinjau dari perspektif sejarah bangsa Indonesia). *Jurnal Artefak*, 5(1). <https://doi.org/10.25157/ja.v5i1.1927>
- Samuel, J. (2018). *Kasus ajaib bahasa Indonesia? Pemodernan kosakata dan politik peristilahan* (D. S. Wardhany, Trans.). Kepustakaan Populer Gramedia bekerja sama dengan École française d'Extrême-Orient, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, dan Forum Jakarta–Paris. (Karya asli diterbitkan tahun 2008)

- Sudaryanto. (2015). Tiga jurusan bahasa Indonesia di Tiongkok Selatan dan Barat Daya. *BAHA STRA*, 34(1), 69–80.
- Sudaryanto. (2017). *Kamus umum bahasa dan ilmu bahasa*. Samudra Biru.
- Sudaryono. (2018). Tiga fase perkembangan bahasa Indonesia (1928–2009): Kajian linguistik historis. *AKSIS: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 2(1), 1–17. <https://doi.org/10.21009/AKSIS.020101>
- Utami, S. R. (2017). Pembelajaran aspek tata bahasa dalam buku pelajaran bahasa Indonesia. *AKSIS: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 1(2), 189–203. <https://doi.org/10.21009/AKSIS.010203>